

Laporan B18
Laporan Pemantauan Pendampingan¹
Lakpesdam PBNU-LAN-OGI

Lakpesdam NU berkolaborasi dengan LAN melakukan coaching (diagnose) kepada OPD di empat (4) daerah yang mengusulkan inovasi sosial dalam program Laboratorium Inovasi (Labinov). Empat (4) daerah tersebut yakni Timur Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Bulukumba (Sulawesi Selatan), Nias Utara (Sumatera Utara), dan Merauke (Papua). Lakpesdam PBNU menggandeng Lakpesdam PCNU Bulukumba sudah melakukan pendampingan secara daring di tiga (3) daerah yaitu Timur Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan Nias Utara (Sumatera Utara). Adapun Merauke rencananya akan digelar minggu ketiga bulan Juli 2022.

Coaching Bulukumba

Dukcapil meningkatkan jangkauan catatan sipil untuk anak khusus di Bulukumba. Terhadap hal ini, Lakpesdam PCNU Bulukumba menyarankan jika ingin meningkatkan partisipasi ini lebih tinggi itu maka catatan sipil penting untuk bekerja sama dengan anak di Bulukumba dengan melibatkan Forum Anak yang sudah terbentuk di tingkat desa hingga kecamatan. Selain itu juga perlu dilibatkan upaya-upaya sederhana jika suatu saat nanti terjadi kolaborasi inovasi penyediaan KIA (Kartu Identitas Anak) untuk anak adalah bagaimana memikirkan ketersediaan anggaran operasional untuk Forum Anak yang di Bulukumba. Rasanya tidak elok jika Dukcapil melakukan inovasi tanpa dana karena akan terkesan. Dukcapil bisa merekomendasikan ke OPD terkait seperti Dinas P3A untuk memberikan biaya-biaya terkait biaya operasional di masa mendatang.

Kedua, soal inovasi yang didorong oleh MTsN 3 Tanete. Sekolah ini merupakan sekolah madrasah di bawah Menteri Agama satu-satunya—sementara sekolah lainnya adalah SMP dan Sekolah Menengah Lanjutan di bawah Kemendiknas. Harapannya MTs ini meningkatkan upaya layanan terkait bagaimana menjembatani MTsN 3 yang terdampak covid-19. Salah satunya adalah biaya pendidikan mengingat covid-19 memberikan dampak luas yakni dengan menjamin anak dapat tetap sekolah. Di Bulukumba sejak ada covid-19 terdapat 8 ribu orang putus sekolah untuk usia SD, SMP, SMA berdasarkan data yang dihimpun tahun lalu. Harapan Lakpesdam PCNU Bulukumba dalam soal ini ada lah adanya praktek baik yang dilakukan MTs ini yang berhubungan dengan soal ini di mana orang bisa terus masuk sekolah di masa yang sulit dan tidak putus sekolah di lingkungan ini. Bersama dengan 3 (tiga) orang gurunya. Di sekolah ini sendiri sudah ada UPZ di bawah koordinasi Baznas Bulukumba atas inisiasi kepala madrasah yang diusulkan ke Kementerian Agama dan Baznas Bulukumba. Pada titik ini Lakpesdam menyampaikan jika UPZ ini bisa membantu memfasilitasi siswa maka hal ini akan bagus sekali. Dalam ini mereka melakukan intervensi untuk memastikan tidak ada siswa mereka yang putus sekolah di tengah jalan melalui anggaran yang disediakan UPZ mengingat UPZ tidak hanya urusan zakat dan infaq serta sedekah. Zakat sudah memiliki peruntukan khusus sehingga perlu didiskusikan infak dan sedekah ini bisa membiayai adik-adik yang terdampak covid-19.

Ketiga, inovasi yang dilakukan Kesbangpol yang mengajukan inovasi sosial soal organisasi. Sayangnya hal ini belum ide sosialisasinya dan target yang ingin dicapai. Kuncinya adalah terciptanya organisasi yang tertib namun juga belum jelas level dari ketertiban yang dimaksud. Kesbangpol pada umumnya adalah tempat organisasi mendaftarkan dirinya sebagai sebuah kelembagaan namun saat ini belum diketahui sejauhmana upaya pembinaan Kesbangpol terhadap sejumlah organisasi. Selayaknya ide ini didiskusikan dulu secara matang di tingkat OPD bersama dengan staf dan pimpinan Kesbangpol.

Di luar itu, inovasi di Bulukumba merupakan pindahan dari Litbang ke Bappeda yang masih belum memaksimalkan komunikasi lebih jauh kepada OPD. Lakpesdam berharap ada inisiatif dari daerah

¹ Laporan ini disusun bersama oleh Lakpesdam PBNU dan Lakpesdam PCNU Bulukumba

untuk membuat diskusi informal terkait bagaimana merancang suatu komunikasi layanan yang terpadu khusus di wilayah Bulukumba. Ide inovasi selama ini selalu datang dari OPD terkait. Seharusnya inovasi ini didiskusikan secara mendalam untuk menjalin kolaborasi dengan OPD terkait khususnya terkait layanan identitas sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Inovasi nampaknya sekedar pemenuhan prasyarat karena diskusi soal ini belum melalui diskusi yang panjang di kalangan internal OPD. Mereka yang menghadiri coaching inovasi ini justru hanya diwakili staf yang totalnya berjumlah 12 OPD. Hanya 2 OPD yang bisa diajak berdiskusi dengan baik. Sebagian lagi inovasi hanya dimaknai usulan pengadaan barang perusahaan. LAN sendiri penting memiliki jalur koordinasi dan komunikasi yang baik mengingat Pemda Bulukumba saat ini merupakan pemerintahan yang baru sehingga memerlukan proses panjang untuk beradaptasi, baik bagi Bupati maupun kepala dinas yang baru saja terpilih hari ini. Kepala dinas masih merasa ragu akan terus menjabat atau diganti. Karenanya diperlukan diskusi mendalam yang dikawal oleh pemda itu sendiri dengan OPD terkait dan juga melibatkan Lakpesdam PCNU Bulukumba sebisa mungkin.

Inovasi sebanyak 106 buah sendiri terlalu banyak sehingga perlu diklusterisasi oleh LAN RI agar ramping yang dirangkum dari seluruh OPD. Selain itu juga untuk memastikan inovasi dapat berjalan semestinya.

Coaching Kabupaten Nias Utara

Melalui coaching OPD di Nias Utara, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kelompok marginal masih belum menjadi perhatian khusus dengan berbagai alasan. Sebagian besar OPD masih terfokus pada problem yang utama yakni penjangkauan layanan masyarakat secara umum dan transformasi birokrasi secara internal agar bisa menjalankan tupoksinya secara efisien. Di sisi lain, kurangnya pemahaman soal pelayanan terhadap kelompok marginal di sebagian OPD atau pemahaman yang masih belum penuh terkait kelompok marginal itu sendiri di OPD lainnya.

Kecamatan Afulu di Nias Selatan misalnya masih mengurus persoalan KK di mana menurut OPD setempat masih terkendala jarak, letak geografis, akses transportasi dan seterusnya. Namun nampaknya mereka masih belum bisa membedakan kendala ini apakah bersikap personal (seperti malas dan seterusnya) atau kesulitan akses. Jika hal ini tidak dipetakan secara tepat maka inovasi yang dilakukan juga tidak tepat karena tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya. Ditambah lagi inovasi yang usulkan masih sebatas inovasi internal tim atau belum mengarah pada kebutuhan masyarakat pada umumnya dan kelompok marginal pada khususnya. Dengan fokus pada kebutuhan kelompok marginal, maka Lakpesdam mengusulkan agar OPD ini menggelar sistem jemput bola di tempat-tempat publik atau memberlakukan pelayanan publik keliling yang sudah ditentukan waktunya sehingga masyarakat *notice*.

Usulan sistem tersebut membuat kelompok marginal yang memiliki kesulitan mengakses pelayanan menjadi terbantu, termasuk dengan menyediakan sarana yang ramah bagi kelompok marginal. Di sisi lain, membantu target pelayanan dari OPD juga dapat cepat terpenuhi. Pada titik ini seharusnya dapat dilihat bahwa pelayanan yang ramah kelompok marginal bukan merupakan sesuatu yang menyulitkan karena seperti menambah pekerjaan mengingat mereka memiliki kebutuhan khusus yang perlu penanganan tertentu. Pelayanan ini justru dapat membantu pemenuhan perencanaan OPD.

Di Kecamatan Lawehe & Kecamatan Lotu yang fokus pada APBDes lebih banyak menitikberatkan transformasi birokrasi. Capaian yang ditargetkan adalah efektivitas birokrasi di mana OPD memiliki target agar APBDes diselesaikan dalam satu hari. Fokus dalam APBDes lainnya adalah memperbaiki APBDes sehingga tidak terlambat dimasukkan ke sistem untuk diproses di waktu berikutnya. Pada titik

ini persoalan esensial tentang alokasi anggaran termasuk alokasi anggaran bagi kelompok marginal belum terlihat dan terakomodir. Kelompok marginal menjadi benar-benar isu pinggiran.

Coaching Timur Tengah Selatan

Di Timur Tengah Selatan inovasi yang dilakukan memiliki pola yang berbeda. Beberapa inovasi sudah fokus menyoroti kelompok marginal dan beberapa isu lainnya sangat netral. Inovasi jenis pertama hanya memerlukan penajaman strategi. Adapun jenis inovasi netral ini bisa menjadi inovasi yang ambigu di mana inovasi ini bisa merangkum semua kelompok sasaran namun juga memiliki kemungkinan salah sasaran karena kurang tepat mengidentifikasi permasalahan, termasuk menyoroti dampak suatu masalah bagi kelompok marginal.

Inovasi “Sekoper Bersama” oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A), misalnya, mengusung pembelajaran digital bagi perempuan yang bisa dipelajari secara offline. Meski demikian inovasi tersebut belum menyediakan fitur untuk kelompok perempuan disabilitas sehingga perlu dipertajam lagi. Inovasi lainnya adalah pembentukan Gugus Tugas Layak Anak oleh OPD yang sama. Gugus tugas ini sayangnya hanya dilatarbelakangi oleh peraturan daerah terkait visi Timur Tengah Selatan untuk menjadi kabupaten layak anak padahal inovasi ini dapat didesain menjadi inovasi yang menyoroti pemenuhan hak anak secara lebih komprehensif. Inovasi komprehensif ini sifatnya dari hulu hingga hilir yang memandang anak dengan pandangan utuh di mana mereka bisa menyuarkan aspirasi dan pemikiran sebagaimana orang dewasa. Sehingga Lakpesam PBNU belajar dari pengalaman pendampingan di Desa Bialo kabupaten Bulukumba bersama dengan Lakpesdam PCNU Bulukumba yang akhirnya mampu mendorong pemerintah desa Bialo menyelenggarakan Musrenbang anak yang diikuti oleh sejumlah anak desa Bialo yang tergabung dalam Forum Anak Desa Bialo, mengusulkan hal yang sama kepada Dinas P3A Timur Tengah Selatan.

Inovasi berjenis netral seperti usulan inovasi penghargaan pegawai internal berprestasi. Diusulkan oleh Dinas P3A namun tidak promosi bagi perempuan sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan terkait visi OPD yang dimaksud terkait tupoksinya. Inovasi lainnya adalah “Membuat Sistem Data Pembangunan, Stunting dan Kemiskinan Secara Online atau Berbasis WebGIS dalam website BAPPEDA”. Usulan inovasi ini tidak mengkhususkan pada persoalan perempuan yang seringkali menjadi korban pertama kemiskinan di suatu daerah. Pendataan bagi kelompok marginal memiliki posisi strategis karena menentukan ada dan tidaknya akses bantuan dan/atau layanan bagi mereka.

Situasi-situasi ini dapat dipahami dengan pembacaan terhadap konteks yang ada. OPD nampaknya belum memiliki pendalaman dan/atau pemahaman yang baik dalam soal pelayanan terhadap kelompok marginal atau kelompok marginal itu sendiri. Tidak heran jika Bappenas menjadikan hal ini sebagai salah satu isu utama RAN (Rencana Aksi Nasional), di samping isu lainnya. Di sisi lainnya political will dari aparat terkait juga sama pentingnya soal pelayanan model ini. Pelayanan kelompok marginal jelas memerlukan kebijakan khusus dibandingkan dengan pelayanan pada kelompok masyarakat pada umumnya. Selain birokrasi yang kompleks, model pelayanan ini perlu mendapat dukungan khusus karena perlu langkah tertentu yang terkadang “menyimpang” dari pakem yang sudah ada.

Kolaborasi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Pelayanan kelompok marginal memang memerlukan kebijakan yang berbeda dari kebijakan pada umumnya, karenanya sebagian pihak merasa hal ini merupakan kebijakan yang memberatkan karena memerlukan energi dan perhatian yang besar, sehingga perlu kolaborasi lintas OPD. Kolaborasi ini perlu disertai pemahaman yang mendalam tentang kelompok marginal yang merupakan sesama warga negara yang perlu dilayani seperti kelompok masyarakat pada umumnya. Alih-alih dianggap merepotkan sehingga dianggap beban

negara, padahal kelompok marginal memang seharusnya didudukkan sebagai warga negara seperti lainnya.

Di tahun sebelumnya Lakpesdam diproyeksikan mendampingi 4 (empat) daerah yakni Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tojo Uno-Uno setidaknya terdapat 8 (delapan) kluster inovasi layanan untuk kelompok marginal. Pertama, kluster disabilitas yakni Care ODD (Peduli Orang Dengan Disabilitas) di Kepulauan Tanimbar.

Kedua, kluster anak yakni KUBE APUS (Kelompok Usaha Bersama Anak Putus Sekolah) dan ADAUT (Ada Rumah Pintar) di Kepulauan Tanimbar, Bersinergi dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak dan Stunting di Lombok Utara, dan Satgas KIBBAR (Satuan Tugas Kesehatan Ibu, Balita, Anak, dan Remaja) di Tojo Una-Una.

Ketiga, kluster perempuan yang merangkum perempuan korban kekerasan dan perempuan miskin serta perempuan sebagai kelompok marginal dalam aspek sosial politik kemasyarakatan seperti Peta Daya Perempuan Tanimbar Berdaya di Kepulauan Tanimbar, Budame Miskin (budidaya udang Vaname sistem kolam bundar bagi perempuan miskin pesisir Kabupaten Lombok Utara) serta Berugak Perempuan di Lombok Utara. Keempat, kluster masyarakat adat seperti Kokore Kodara (Kokore Ko Sodara) di Sorong.

Kelima, kluster PMKS seperti Satgas PMKS (Satuan Petugas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Lombok Utara. Keenam, kluster masyarakat pulau terpencil seperti Nyatfar Kreatif di Lombok Utara dan Dokter Masuk Pulau di Tojo Una-Una. Ketujuh, lansia seperti Kelas Teras (Kelompok Lansia Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional) di Lombok Utara dan Gerakan Cinta Lansia di Tojo Una-Una. Kedelapan, kluster masyarakat miskin seperti Si Abang Tersipu (Sistem Informasi Bangunan Terintegrasi Sistem Informasi Penduduk Miskin) di Tojo Una-Una.

Di luar kluster ini terdapat 2 (dua) kluster inovasi yang sasaran kelompok marginalnya beririsan satu sama lain. Pertama, kluster lansia dan disabilitas seperti Hore (Home Care) Sehat di Lombok Utara. Kedua, kluster perempuan dan anak seperti SURAT KLU (Sistem Laporan dan Rujukan Terpadu) di Lombok Utara, Satiba (Sayang Ibu Sayang Anak) di Sorong, dan Gelakondara (Konsultasi Pengarusutamaan Gender dan Anak) di Tojo Una-Una. K